

Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental





Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Kebijakan Publik
- Kebijakan vs Regulasi
- Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
- RPJMN 2015-2019
- Bangsa yang Politiknya Berdaulat, Ekonominya Mandiri, dan Kebudayaannya Berkepribadian
- Sasaran Revolusi Mental berdasarkan Program K/L



Kebijakan Publik

- Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara.
 - Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dsb.
 - Di negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat
 - Di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.
- “Public policy is whatever governments choose to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2)
 - “what governments do, why they do it, and what difference it makes.” (Dye, 1992)

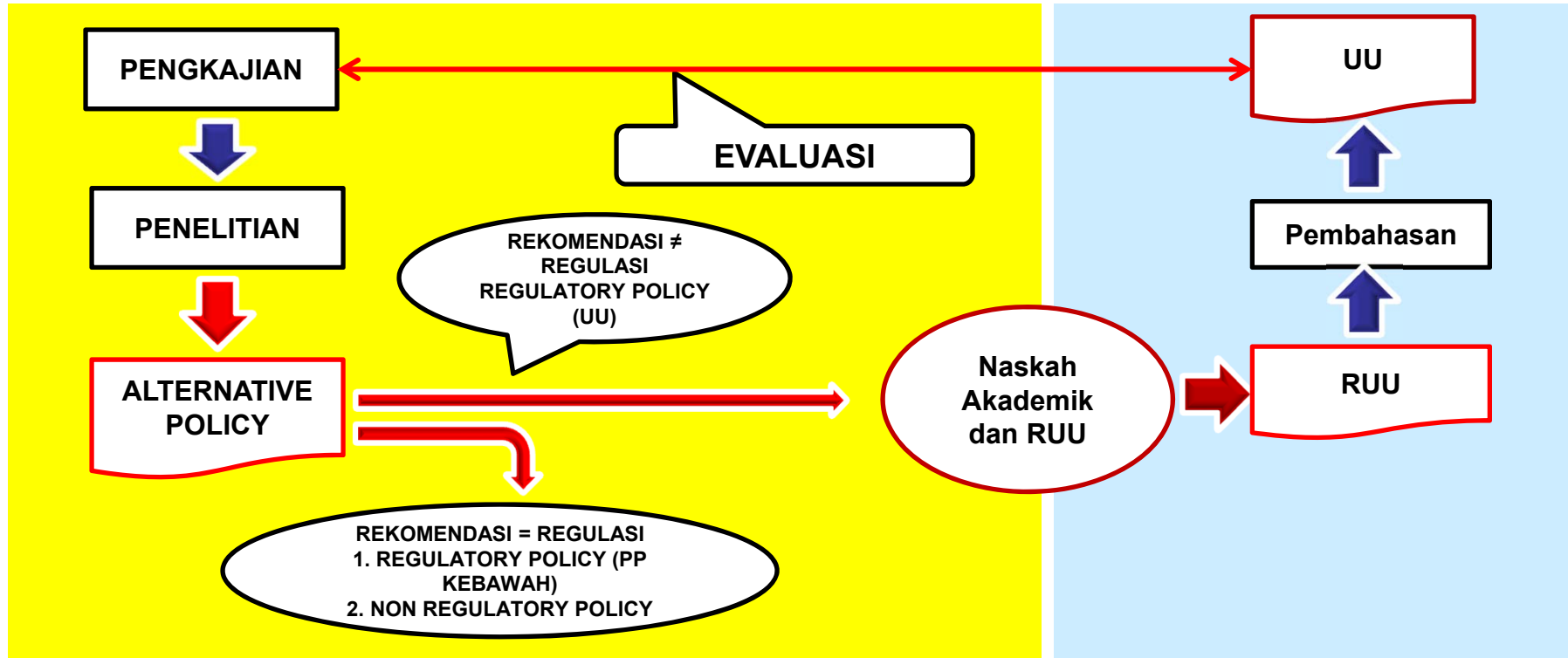
Kebijakan vs Regulasi

Kebijakan	Regulasi
1. Pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif tindakan	1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih
2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi.	2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan
3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis.	3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib
4. Bebas norma: perubahan kebijakan dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau dalam format regulasi, ia harus patuh norma.	4. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma, harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain).
	5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara.

Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi

KERANGKA KEBIJAKAN

KERANGKA REGULASI



PENELITIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation

PENELITIAN:

1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
 - a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
 - b. Kegiatan lain yang bersifat executorial

RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 5/2015



Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
- 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa**
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
- 2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,**
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



Strategi Pembangunan Nasional

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan
Penegakan Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan Pangan
 2. Kedaulatan Energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 - 6. Revolusi Mental**
 7. Kawasan Perbatasan.

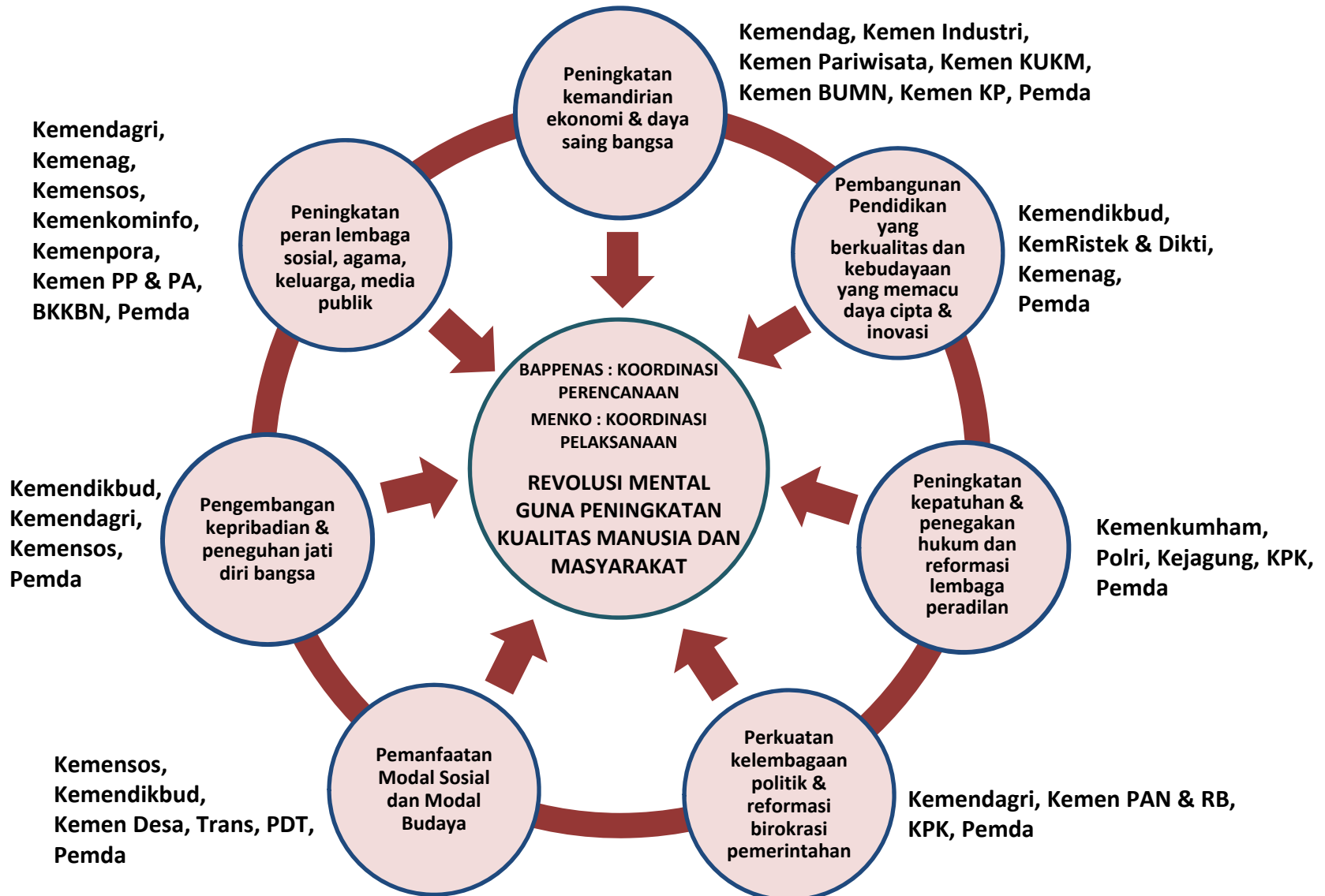


Sasaran Pembangunan Revolusi Mental

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:

1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa
2. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan
4. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan
5. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya
6. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa
7. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik

Koordinasi Revolusi Mental



Revolusi Mental

Sasaran Nawacita	Kementerian/Lembaga/ BUMN
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Industri 3. Kementerian Pariwisata 4. Kementerian KUKM 5. Kementerian BUMN 6. Kementerian Kelautan Perikanan
2. Pembangunan Pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian RISTEK dan DIKTI 3. Kementerian Agama
3. Peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. TNI-POLRI 3. Kejaksaan Agung 4. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Perkuatan Kelembagaan Politik dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kejaksaan Agung 3. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi
6. Pengembangan Kepribadian dan Peneguhan Jati Diri Bangsa	1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Sosial
7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Agama, Keluarga, Media Publik	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Komunikasi dan Informasi 5. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional




**Bangsa yang Politiknnya Berdaulat,
Ekonominya Mandiri, dan
Kebudayaanannya Berkepribadian**

Posisi Strategis Indonesia

- Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa posisi geografis Indonesia sangat strategis sebagai negara yang berpotensi menjadi salah satu pemain kunci perdagangan internasional dan transportasi laut antarnegara.
- Posisi geo-ekonomi dan geo-politik yang sangat strategis ini sangat menguntungkan, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan Asia dan dunia.



SDM Indonesia yang Unggul

- 
- The background of the slide features five black silhouettes of business professionals standing on a white, 3D-rendered staircase that ascends from the bottom right towards the top left. The silhouettes represent a man in a suit on the left, a woman in a business dress in the middle, and three men in suits on the right, each at different levels of the staircase.
- Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta mandiri diperlukan manusia-manusia unggul dengan:
 - Pendidikan yang baik,
 - Memiliki keahlian dan keterampilan,
 - Menguasai teknologi,
 - Pekerja keras,
 - Mempunyai etos kemajuan

SDM Indonesia yang Unggul

- Manusia unggul juga harus punya sikap optimistik dalam menatap masa depan dan memiliki nilai-nilai luhur yaitu:
 - Gotong royong,
 - Toleransi,
 - Solidaritas,
 - Rukun,
 - Saling menghargai dan menghormati.



Kedaulatan Politik

Kedaulatan Politik dapat dicapai melalui:

- Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi,
- Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat,
- Peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan public,
- Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik.



Kemandirian Ekonomi

Kedaulatan Ekonomi dapat dicapai melalui:

- Pemberian akses yang merata ke sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis maritim dengan penerapan doktrin poros maritim dunia;
- Pengelolaan energi dan pangan melalui hilirisasi produk-produk pertanian (pangan) dan pengolahan minyak bumi dan hasil tambang, untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat;
- Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor);

Kemandirian Ekonomi

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan:
 - Meningkatkan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar dalam negeri;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; dan
 - Meningkatkan kesadaran produsen untuk menggunakan komponen produk dalam negeri yang lebih tinggi.



Kepribadian dalam Kebudayaan

- **Peningkatan pendidikan** yang berkualitas untuk melahirkan manusia-manusia unggul, yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya cipta dan kreativitas, daya saing, serta merancang masa depan bangsa yang maju, modern, dan mandiri.
- **Peningkatan kualitas lembaga pendidikan** (sekolah/madrasah dan universitas) sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang tercermin pada:
 - proses pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan iptek,
 - pengembangan bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman) sebagai instrumen untuk mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan dan membangun peradaban modern.

Kepribadian dalam Kebudayaan

- **Peningkatan peran keluarga** sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan dan pendidikan di rumah, pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti, serta wahana sosialisasi dan persemaian nilai-nilai luhur.
- **Peningkatan kesadaran masyarakat** akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan.
- **Pengembangan karakter dan jati diri bangsa** yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila.

K/L Terkait Sasaran Revolusi Mental

Nawacita	Kementerian/Lembaga/ BUMN
Kedaulatan Politik	
1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. TNI-POLRI 3. Kejaksaan Agung 4. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan.	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kejaksaan Agung 3. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemandirian Ekonomi	
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa.	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Industri 3. Kementerian Pariwisata 4. Kementerian KUKM 5. Kementerian BUMN 6. Kementerian Kelautan Perikanan

K/L Terkait Sasaran Revolusi Mental

Nawacita	Kementerian/Lembaga/ BUMN
Kepribadian dalam Kebudayaan	
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi.	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian RISTEK dan DIKTI 3. Kementerian Agama 4. Perpustakaan Nasional RI
2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya.	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi
3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa.	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Sosial
4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Komunikasi dan Informasi 5. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 6. Kementerian Kesehatan 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak 8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sasaran Revolusi Mental berdasarkan Program K/L

- A. Kedaulatan Politik
- B. Kemandirian Ekonomi
- C. Kepribadian dalam Kebudayaan

A. Kedaulatan Politik

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri	Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah		
		Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antarlembaga	2 Gubernur dan Pimpinan DPRD, 83 Bupati dan Pimpinan DPRD, 15 Walikota dan Pimpinan dan Anggota DPRD	Fasilitasi Kepala Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	34 Provinsi	Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia
	Badan Pengawasan Pemilu	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		
		Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	34 paket	Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk organisasi masyarakat sipil (OMS)
Komisi Pemilihan Umum	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	9	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih	

A. Kedaulatan Politik

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Program Penguatan Pemerintahan Desa		
		Peningkatan Pelayanan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	33 provinsi dan 25 kabupaten/kota	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan wilayah desa
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan	2	Jumlah kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender
	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Aplikasi Informatika		
		Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat	2	Jumlah penguatan dan pembuatan purwarupa fasilitas umum untuk Internet Boat CAP dan M-CAP
	Kementeriann Koordinator Bidang Polhukam	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerja Sama Keamanan	1	Laporan Indeks Keamanan Dalam Negeri

A. Kedaulatan Politik

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	Kejaksaan	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan Hankam		
		Penerangan dan Penyuluhan Hukum	512	Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana
	Komisi Pemberantasan Korupsi	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	110	Jumlah mitra strategis sektor pendidikan yang melaksanakan program pembangunan integritas
	Kementerian Hukum dan HAM	Program Pembinaan Hukum Nasional		
		Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	300 Desa	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok kadarkum di setiap wilayah
	Komisi Nasional HAM	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan Hukum		
		Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	50 orang/aparatur	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang memperoleh pendidikan pelatihan (ToT) HAM
	Mahkamah Konstitusi	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		
		Pendidikan dan pelatihan Hak Konstitusional warga negara	12	Jumlah laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara

A. Kedaulatan Politik

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	Komisi Yudisial	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim		
		Pelayanan atas penanganan laporan dugaan KEPPH	125	Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat
	Kementerian PAN dan RB	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
		Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	3 tim	Jumlah tim RB nasional yang melaksanakan fungsi pengendalian RB nasional
	POLRI	Program Pendidikan dan latihan Aparatur Polri		
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri	100000	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri
	Lembaga Administrasi Negara	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara		
		Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	100 Peserta	Jumlah peserta TOT Diklat Reformasi Mental dalam Pelayanan Publik
	BPKP	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
		Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	2,1	Jumlah Sertifikat Auditor Terbit/tahun

A. Kedaulatan Politik

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan 2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	BKPM	Program Peningkatan Daya Saing	40,0	Persentase PTSP Pusat yang telah menyelenggarakan pelayanan perizinan investasi yang sesuai dengan SOP perizinan yang telah ditetapkan
	Kementerian Luar Negeri	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	90%	Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme

B. Kemandirian Ekonomi

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR	
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa	Kementerian Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan			
		Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	500000	Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP) (Ha)	
		Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian			
		Pengembangan Pemasaran Domestik	30	Peningkatan jumlah poktan/gapoktan yang memperoleh akses pemasaran (unit usaha)	
	Kementerian Perindustrian	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
		Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	90	Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM Pengolahan Kopi Spesial di Aceh, Sumatera Utara, Lampung	
		Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan			
		Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	280	Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (orang)	
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Program Pengawasan Persaingan Usaha				
		50%	Tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat		

B. Kemandirian Ekonomi

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Kepemudaan dan Keolahragaan		
		Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	4000	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan
	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Program Pendidikan Tinggi		
		Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	3.969.736	Persentase mahasiswa diploma dan sarjana yang dilatih kewirausahaan dengan bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
		Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	28	Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan)
	Kementerian Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Pengembangan Industri Pariwisata	5	Pembinaan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata yang memberikan pelayanan terbaik kepada pendatang (Lokasi)
	Kementerian ESDM	Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas		
		Pembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	39	Produksi BBM (juta KL)
		2,41	Produksi kilang LPG (juta Ton)	
		25,52	Produksi LNG (MMTPA)	

B. Kemandirian Ekonomi

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan	4	Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender
	Badan POM	Program Pengawasan Obat dan Makanan		
		Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	17,5	Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Dasar		
		Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD	31526	Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku
		Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP	7760	Jumlah SMP yang menerapkan Kurikulum yang berlaku
		Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB	626	Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang melaksanakan Kurikulum yang berlaku
		Program Pendidikan Menengah		
		Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	12461	Jumlah sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter
		Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	4346	Jumlah sekolah SMK yang menerapkan pendidikan karakter
		Program Pelestarian Budaya		
		Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	175	Komunitas Budaya yang difasilitasi
		Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	990	Karya budaya yang diinventarisasi
		Pengembangan Sejarah	116	Buku Sejarah (Termasuk Atlas dan Buku Sejarah)
		Pembinaan Kesenian	10	Pengkayaan Materi Ajar Seni
		Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		
		Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra	1600	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan apresiasi sastra

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Agama	Program Pendidikan Islam		
		Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	24031	Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku
			16371	Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku
			5000	Jumlah Siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI
		Program Bimbingan Masyarakat Islam		
		Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	75313	Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
		Program Bimbingan Masyarakat Kristen		
		Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen	34	Penerapan Kurikulum yang berlaku
		Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	35	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen (kegiatan)
		Program Bimbingan Masyarakat Katolik		
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	15	Jumlah KMK yang menerima bantuan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan katolik		
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	35	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik (kegiatan)		

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Agama	Program Bimbingan Masyarakat Hindu		
		Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Hindu	269341	Jumlah siswa yang memperoleh layanan pendidikan Agama Hindu
		Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu	35	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu (kegiatan)
		Program Bimbingan Masyarakat Budha		
		Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Budha	3554,8348	Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
		Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	35	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha (kegiatan)
		Program Kerukunan Umat Beragama		
		Bimbingan Umat Khonghucu	1340 org	Jumlah Guru Agama Konghucu yang kompeten
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	107	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, guru agama, pendakwah, cendikiawan, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan		

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan		
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	6500	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)
2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya	Kementerian Ristek dan Dikti	Program Pendidikan Tinggi		
3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa		Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	16.223	Jumlah hasil penelitian di Perguruan Tinggi
4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	6.700	Jumlah Prodi yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
		Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
		Pengarusutamaan gender bidang pendidikan	2	Jumlah kebijakan bidang pendidikan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender
		Program Perlindungan Anak		
		Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL)	5	Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
	BKKBN	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga		
		Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	55,5%	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR	
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Sosial	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan			
		Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	8559	Jumlah individu pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSM, TKSK) yang dikembangkan	
	Kementerian Dalam Negeri	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	34 Provinsi	Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	
	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan			
		Koordinasi Wawasan Kebangsaan	60%	Persentase (%) rekomendasi Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti	
	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Kepemudaan dan Keolahragaan			
		Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda	2826	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Program Pendampingan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3)	
Kementerian Kesehatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan				
	Peningkatan Intelegensia Kesehatan	7	Jumlah instrumen peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan intelegensia sesuai tahapan siklus hidup		

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR	
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	Strategi komunikasi kepada masyarakat kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200 kecamatan	
	Kementerian PU dan Pera	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental	300	Jumlah kecamatan percontohan	
	Kementerian LH dan Kehutanan	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	412 komunitas dan 480 orang	jumlah role model perilaku peduli lingkungan dan kehutanan meningkat setiap tahun	
	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman Peningkatan Koordinasi Kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim	100%	Persentase permasalahan sektoral mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, seni, budaya dan olahraga maritim, penguatan inovasi dan ekonomi kreatif maritim, sistem observasi dan informasi maritim, yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya (%)	
	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	Strategi komunikasi kepada masyarakat kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200 kecamatan	

C. Kepribadian dalam Kebudayaan

SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi 2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya 3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa 4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Program Pembangunan Desa		
		Pembangunan Sumber Daya Manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa	34 provinsi, 505 kabupaten/ kota	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) termasuk penguatan kelembagaan Posyandu dalam pelayanan sosial dasar masyarakat
			20 kabupaten/ kota	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
	Perpustakaan Nasional	Program Pengembangan Perpustakaan		
		Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	50	Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (unit perpustakaan)
		Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	137	Pemasyarakatan Minat Baca (kali)



Terima Kasih